

# **PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**



## **TAHUN 2023**

Jl. WIDANA TAHIR HASAN Telp(0723) 461152 dan Faxes (0723) 461152

Email : [bapendawkb@gmail.com](mailto:bapendawkb@gmail.com)



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Widana Tahir No.1 Komplek Perkantoran Pemda Way Kanan Telp (0723)461204  
Blambangan Umpu – Way Kanan34764

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR: 800/12 /V.04-WK/2023

#### TENTANG

#### PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka penataan bidang ketatalaksanaan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat proses, perlu menetapkan peta proses bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
10. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way

Kanan merupakan acuan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan agar:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan;
- c. Terdapat keselarasan dalam penyusunan standar operasional prosedur.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN**



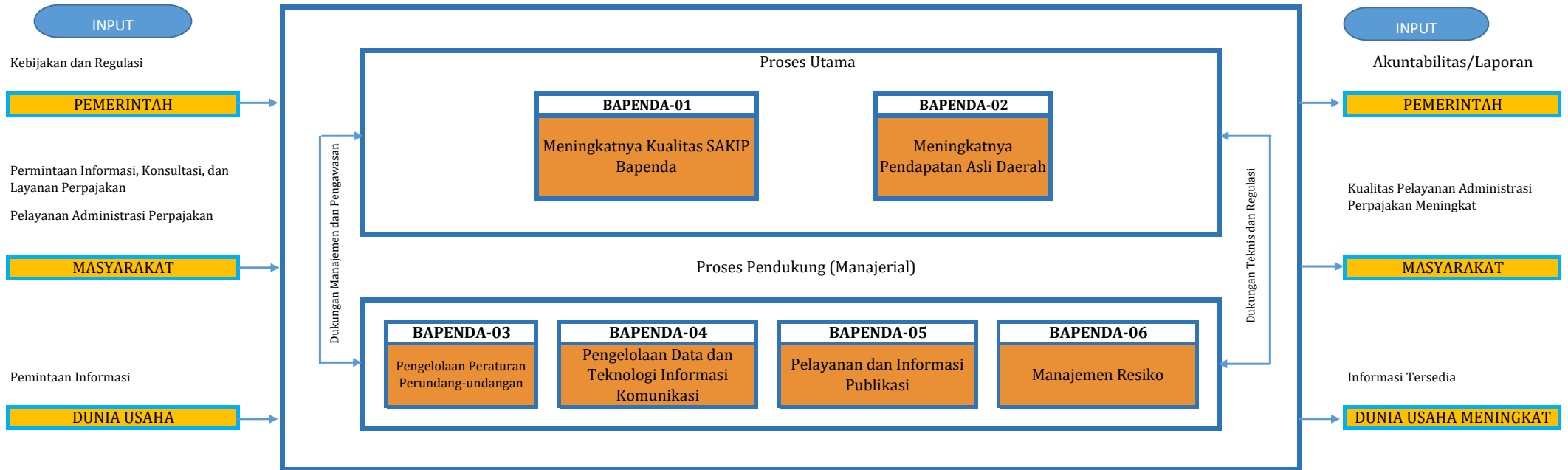
**Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, M.M.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.19700601 199702 1 005**

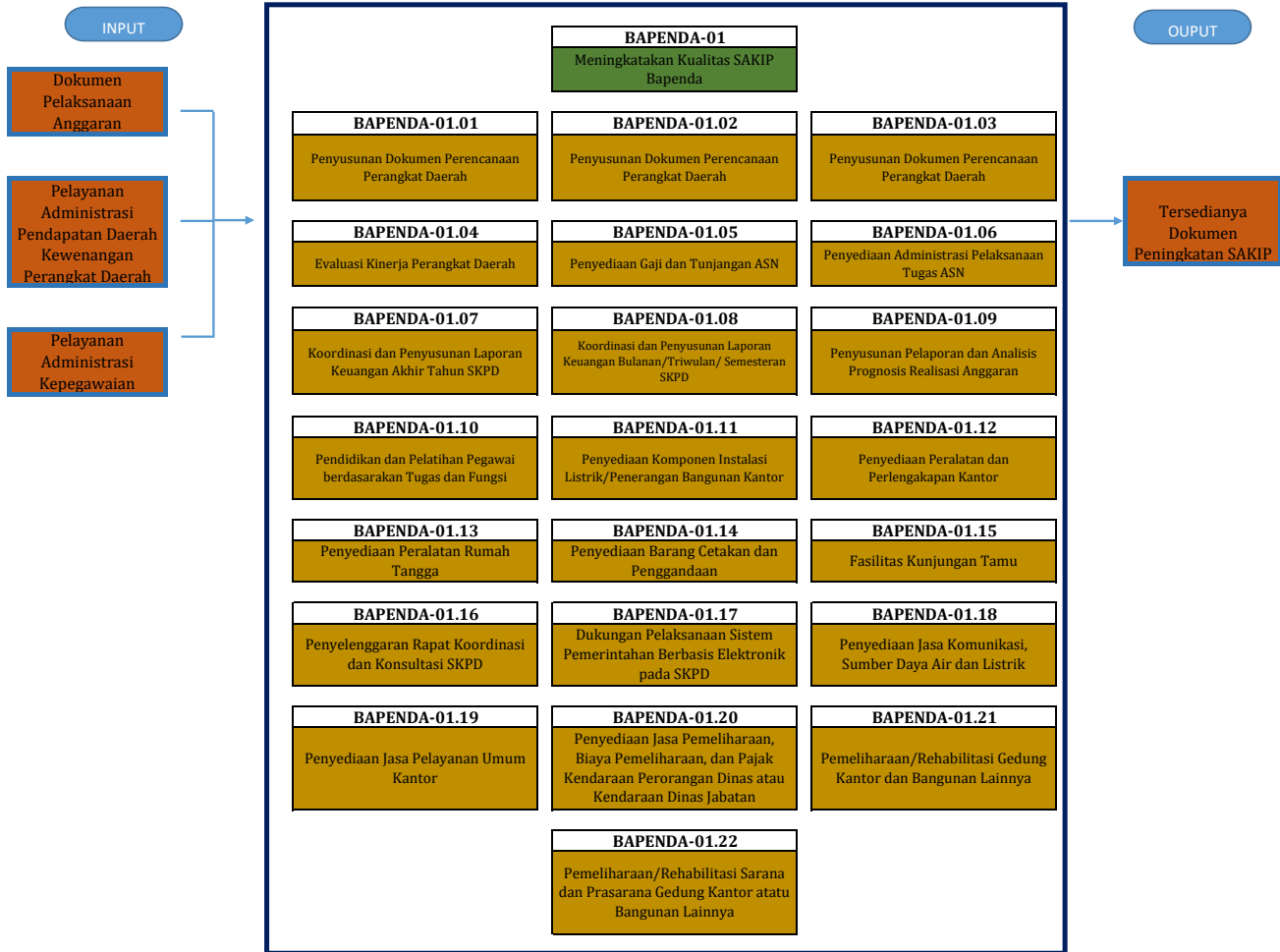
Lampiran : Keputusan Badan Pendapatan Daerah  
Nomor : 800/12/V.04-WK/2023  
Tanggal : 05 Januari 2023

### PETA PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN



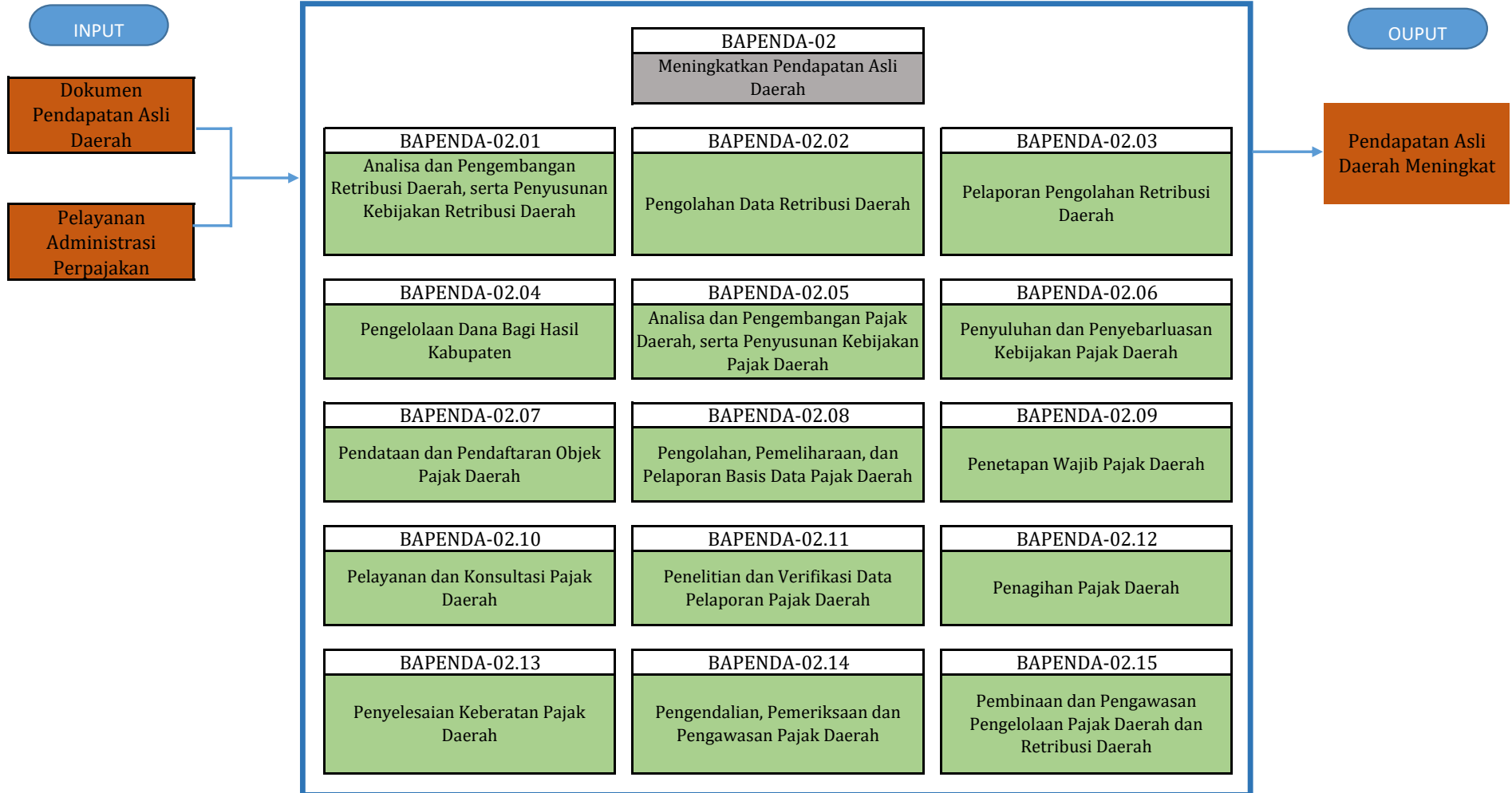
PETA SUB PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Misi : 1  
 Proses Utama : 01

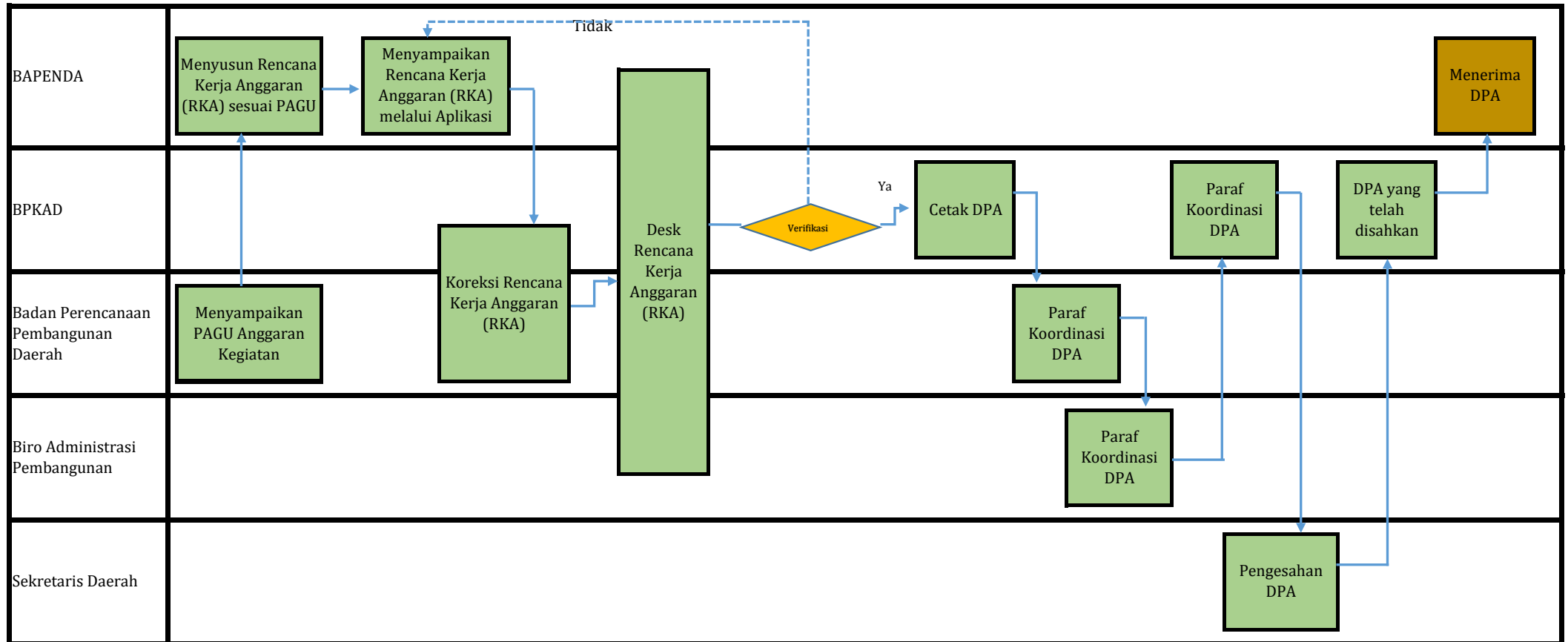


## PETA SUB PROSES BISNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

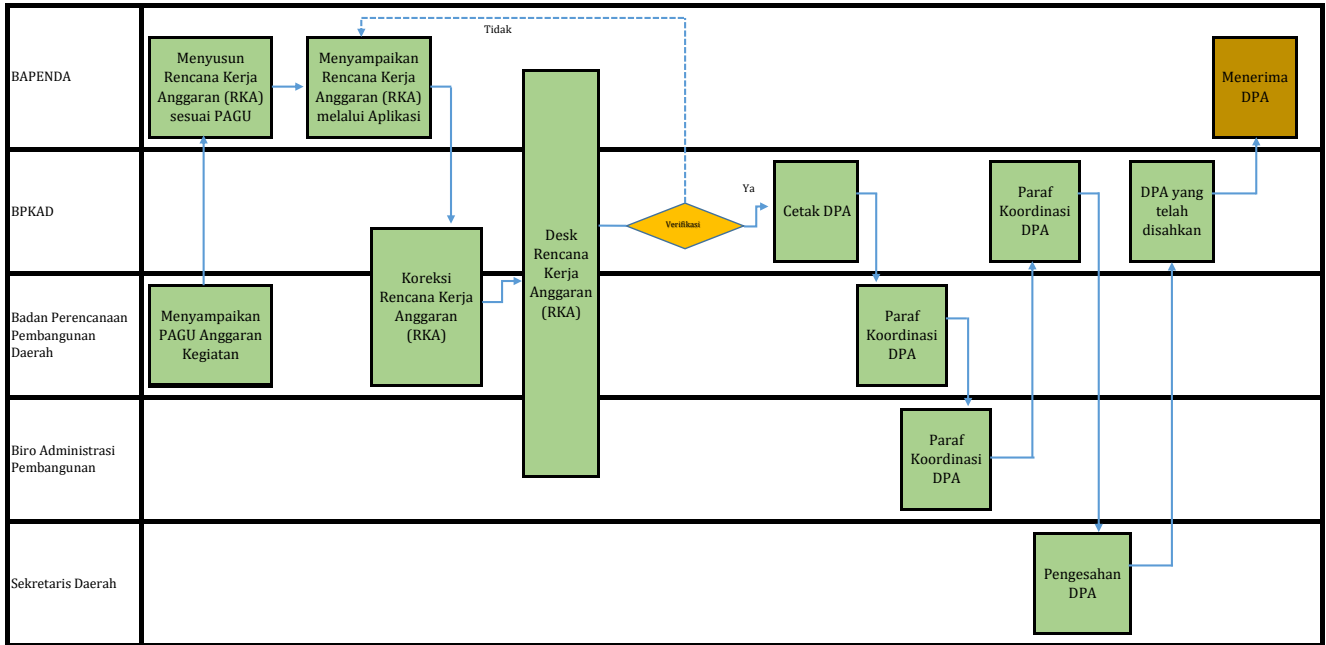
Misi : 1  
 Proses Utama : 02



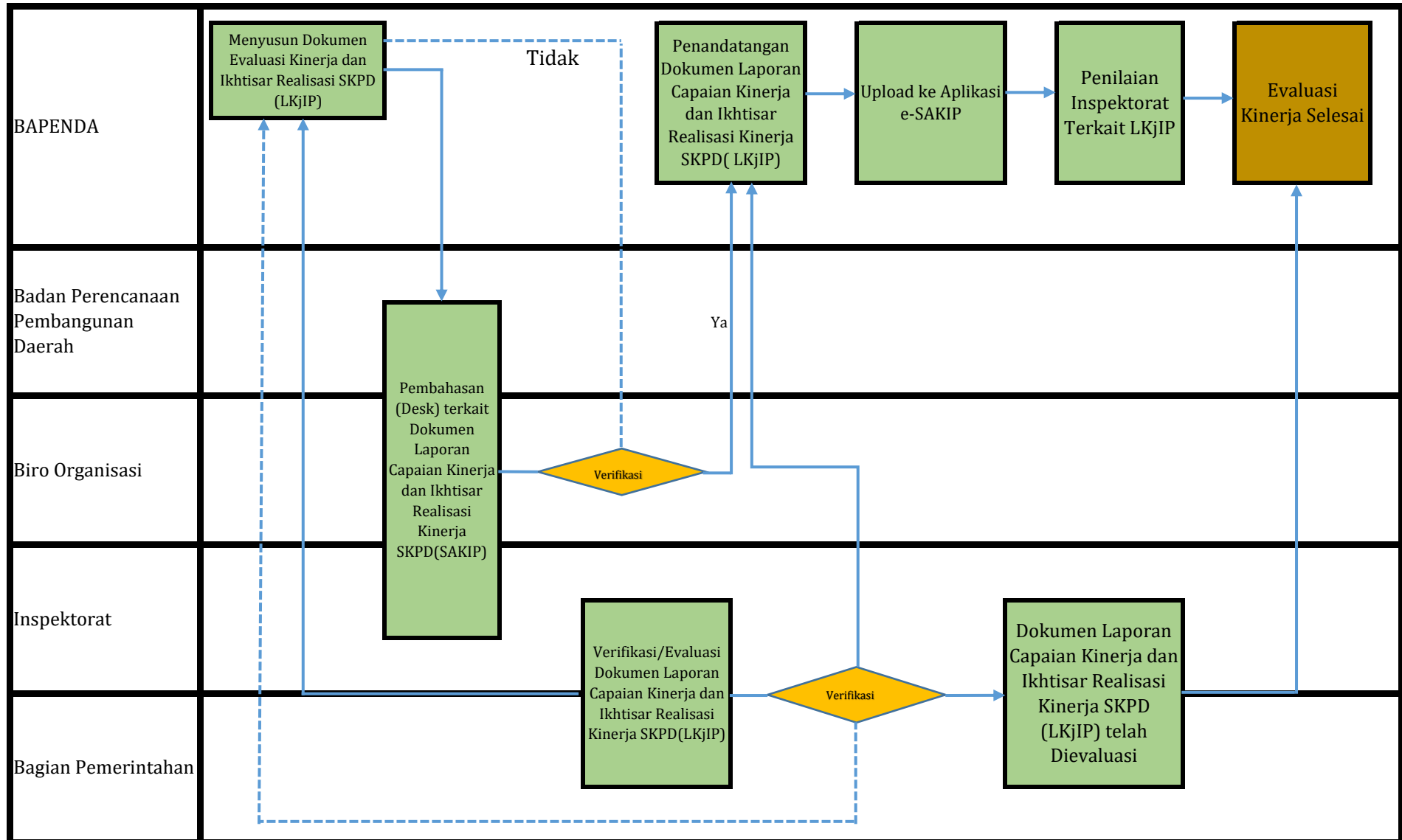
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
BAPENDA-01.01



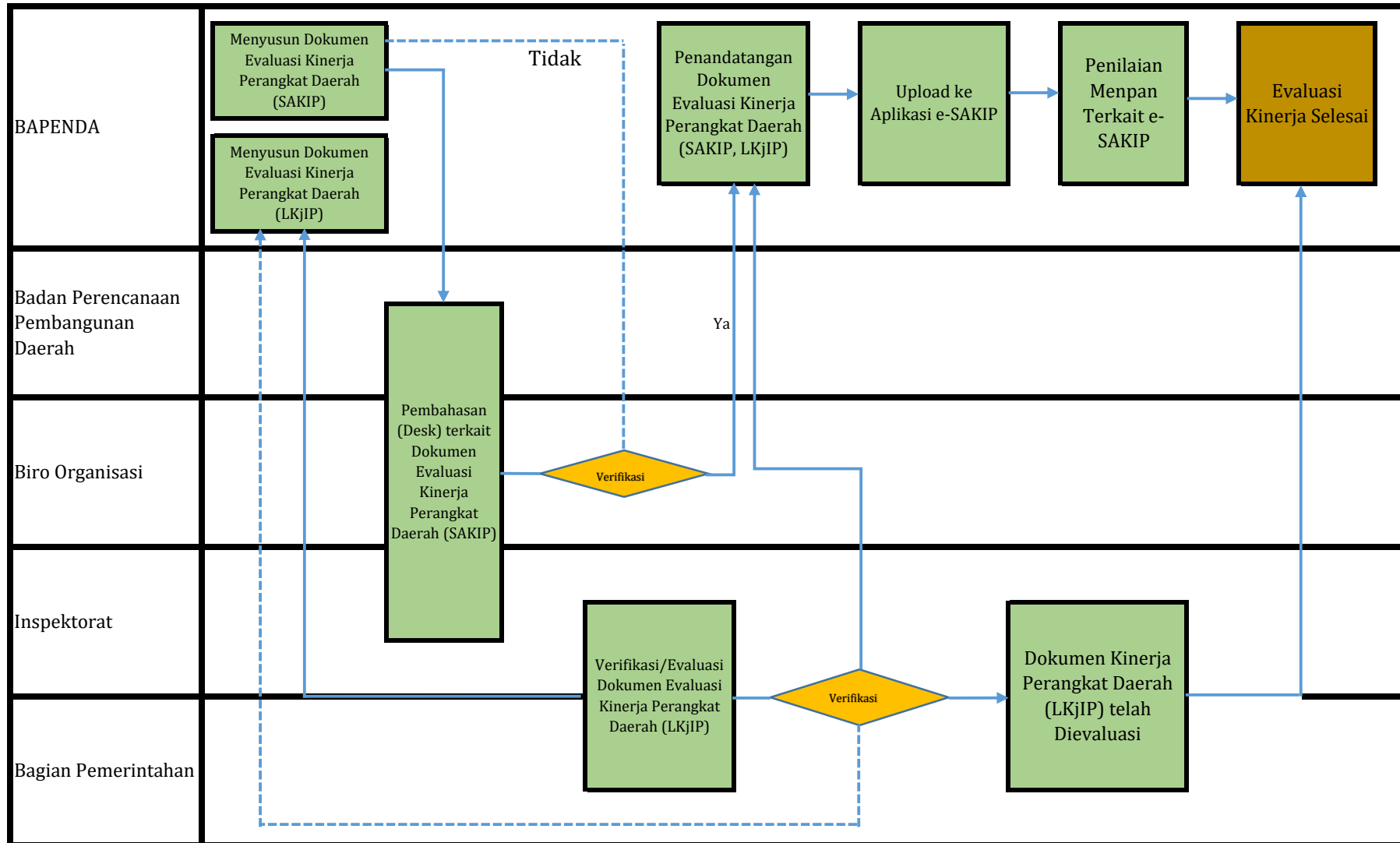




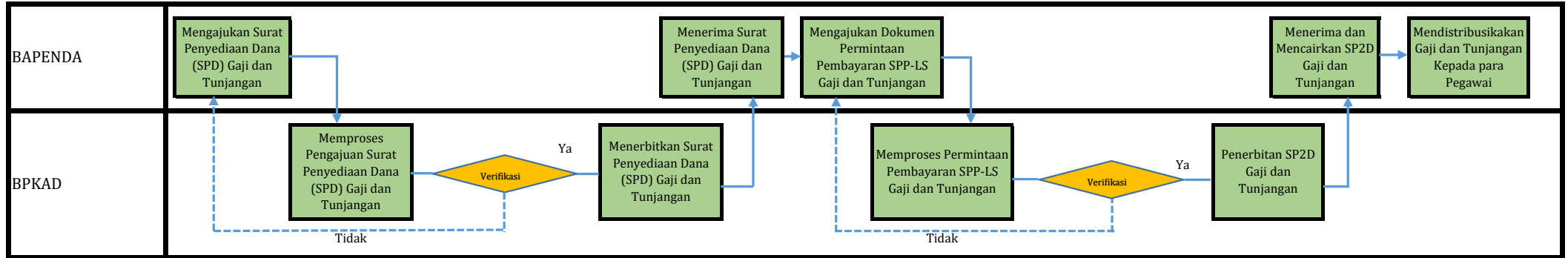
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
 BAPENDA-01.04



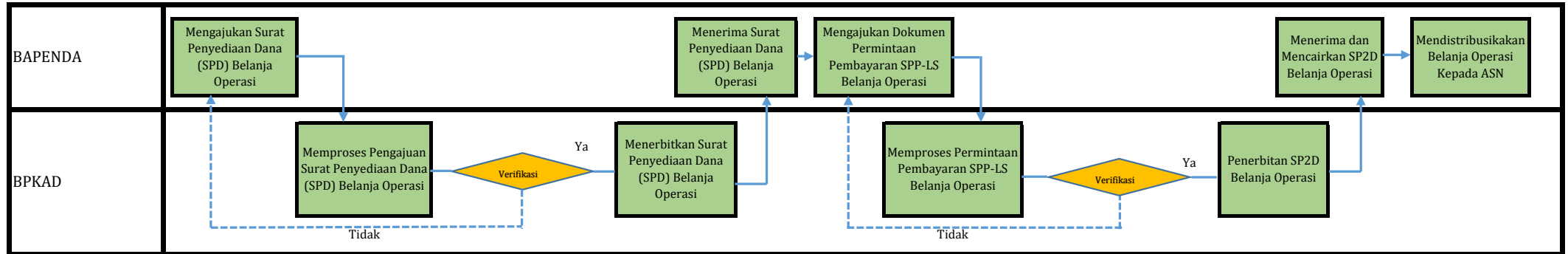
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
BAPENDA-01.04



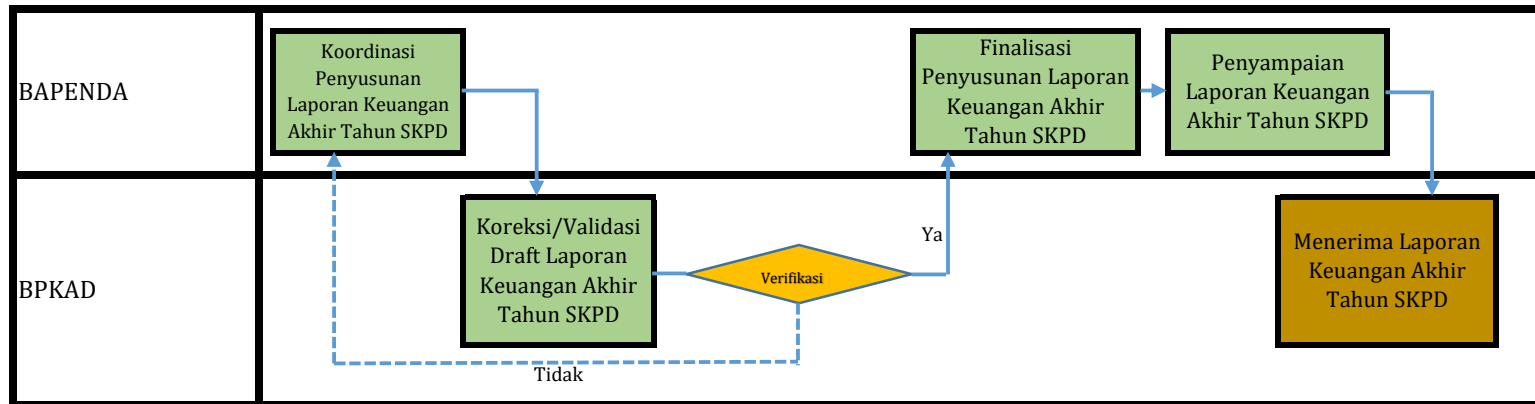
Penyediaan Gaji dan Tunjangan  
BAPENDA-01.05



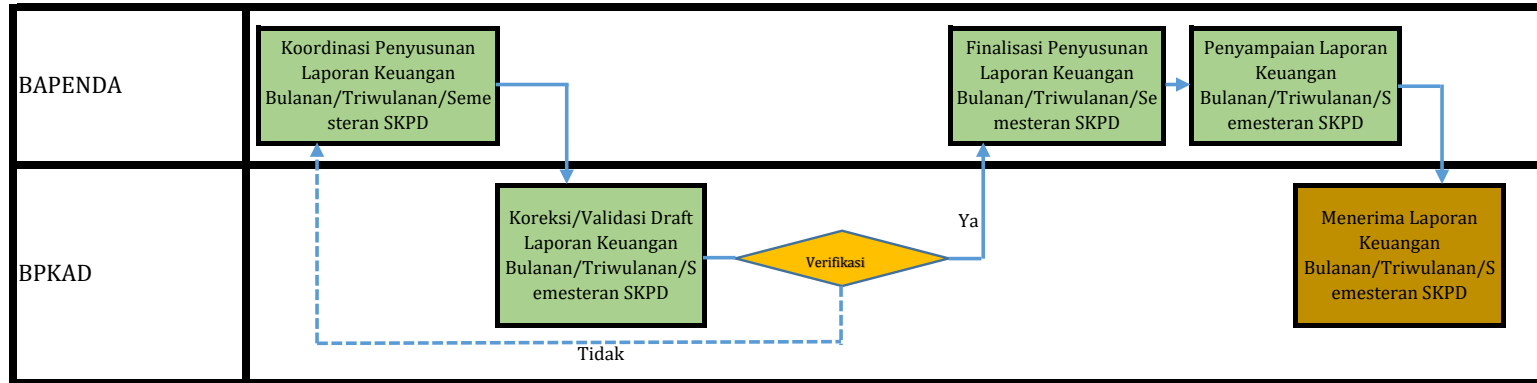
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
BAPENDA-01.06



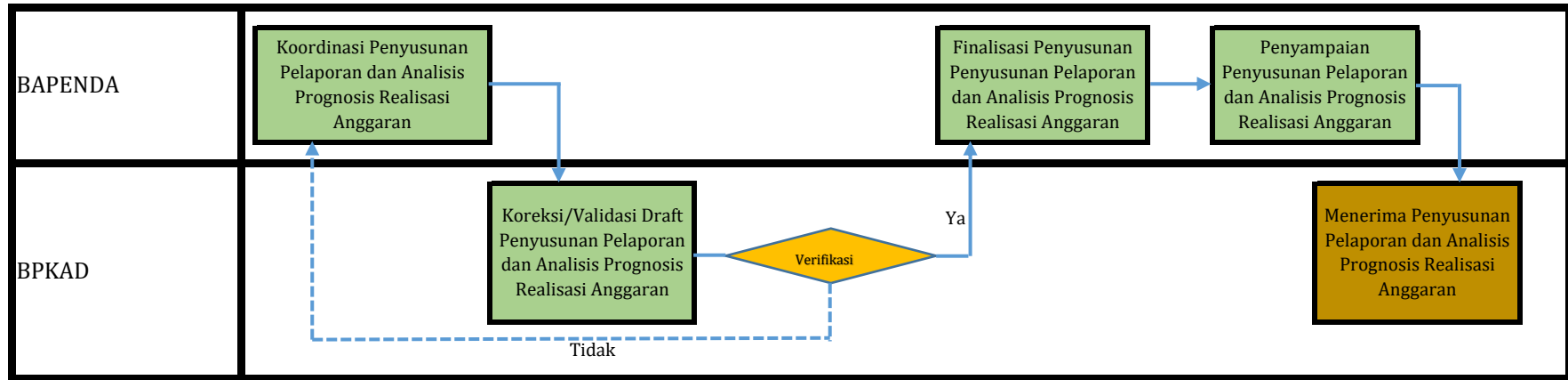
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  
BAPENDA-01.07



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  
BAPENDA-01.08

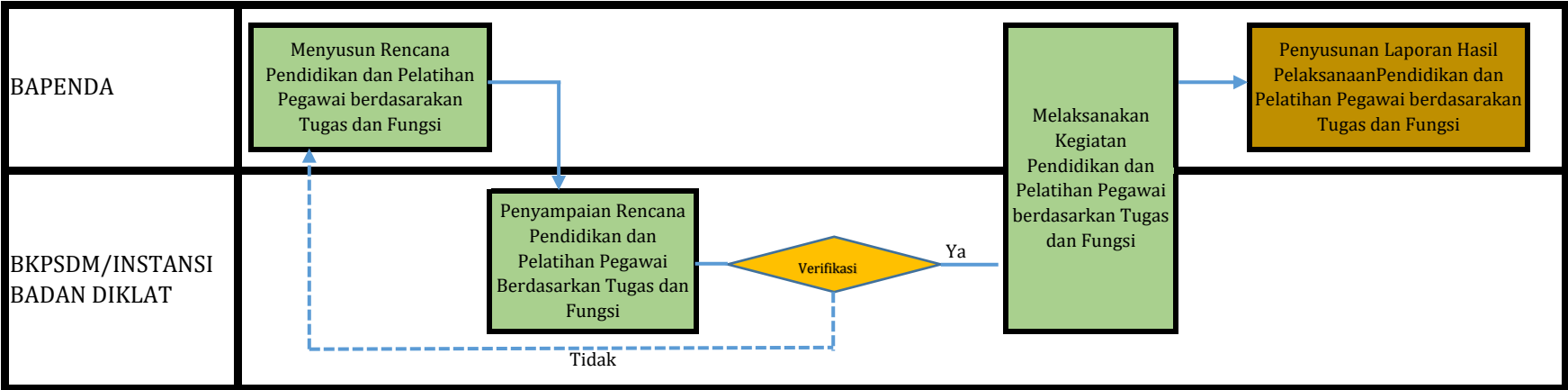


Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  
BAPENDA-01.09

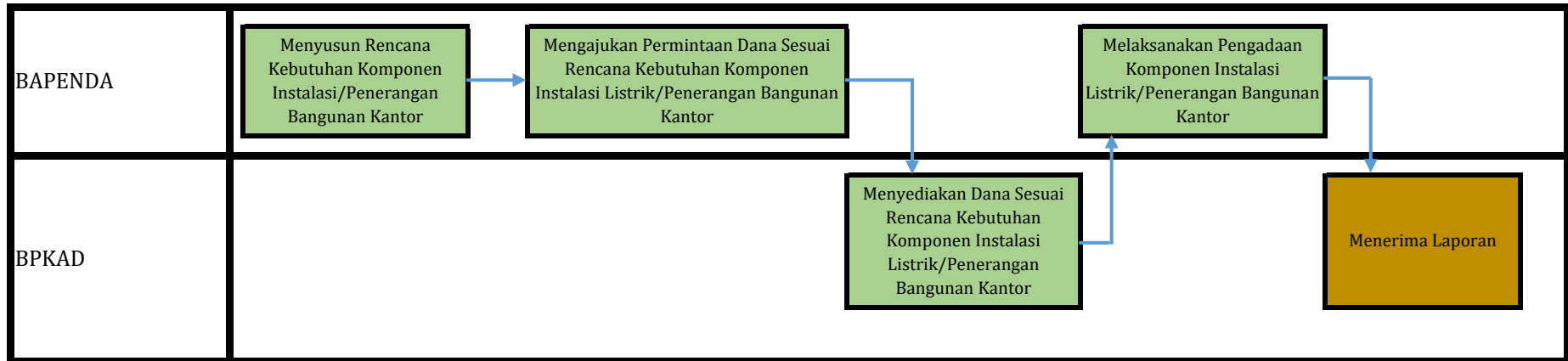




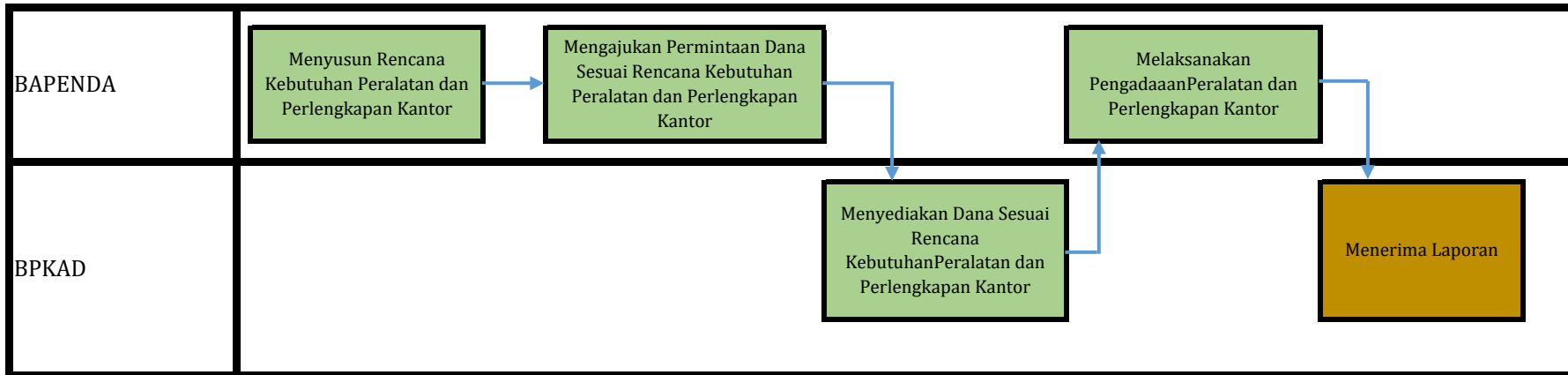
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi  
BAPENDA-01.10



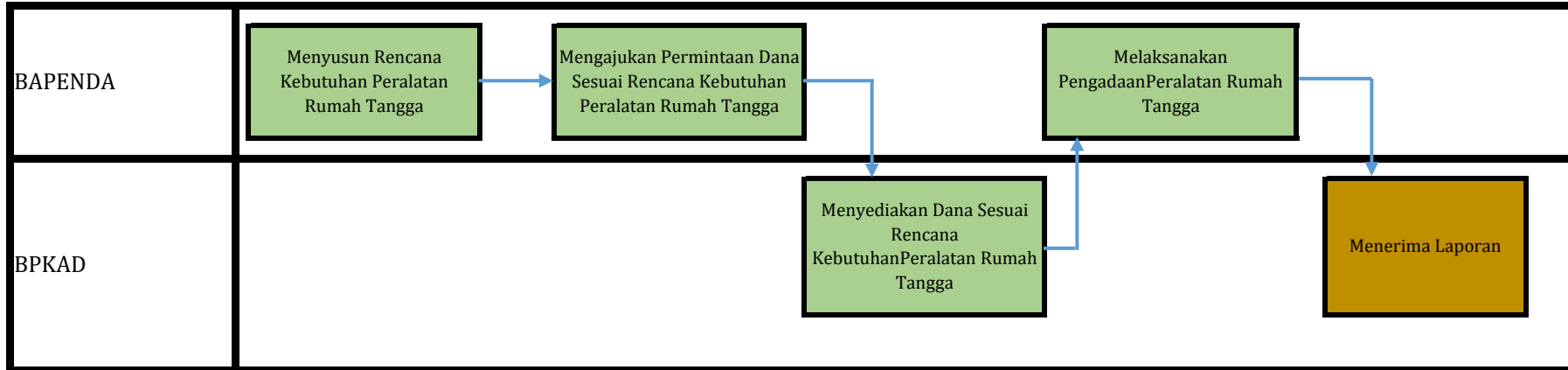
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
BAPENDA-01.11



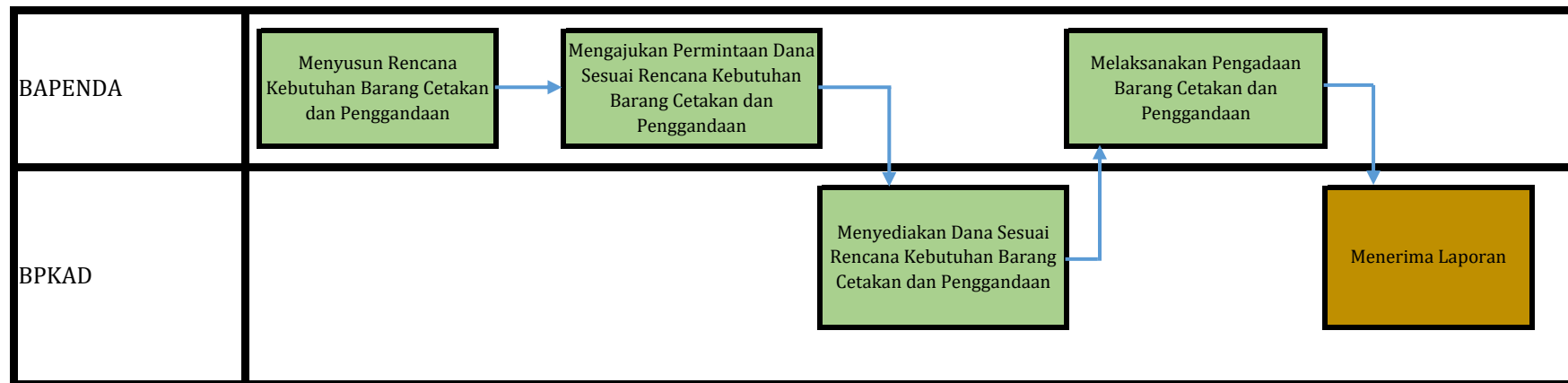
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
BAPENDA-01.12



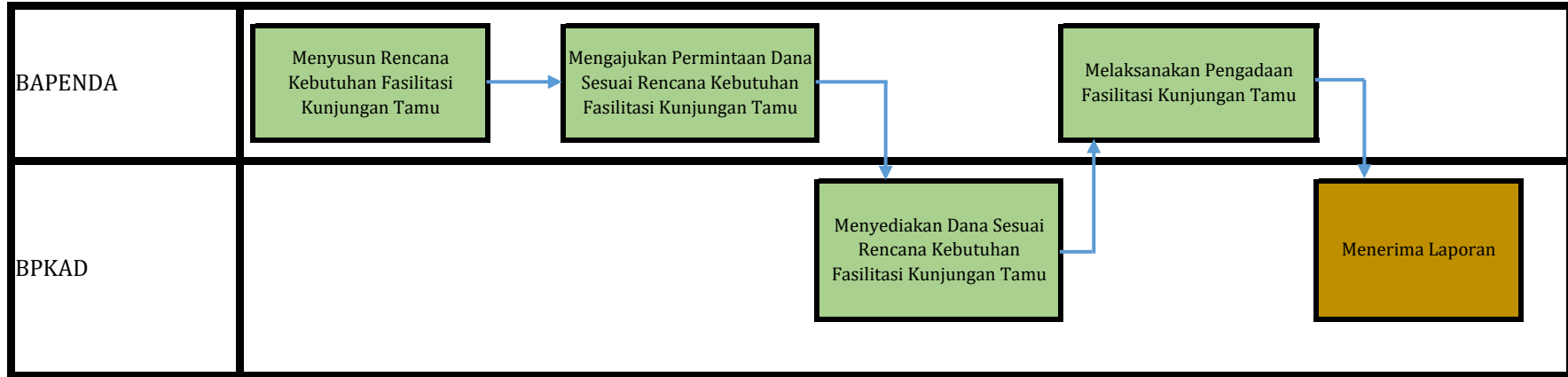
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
BAPENDA-01.13



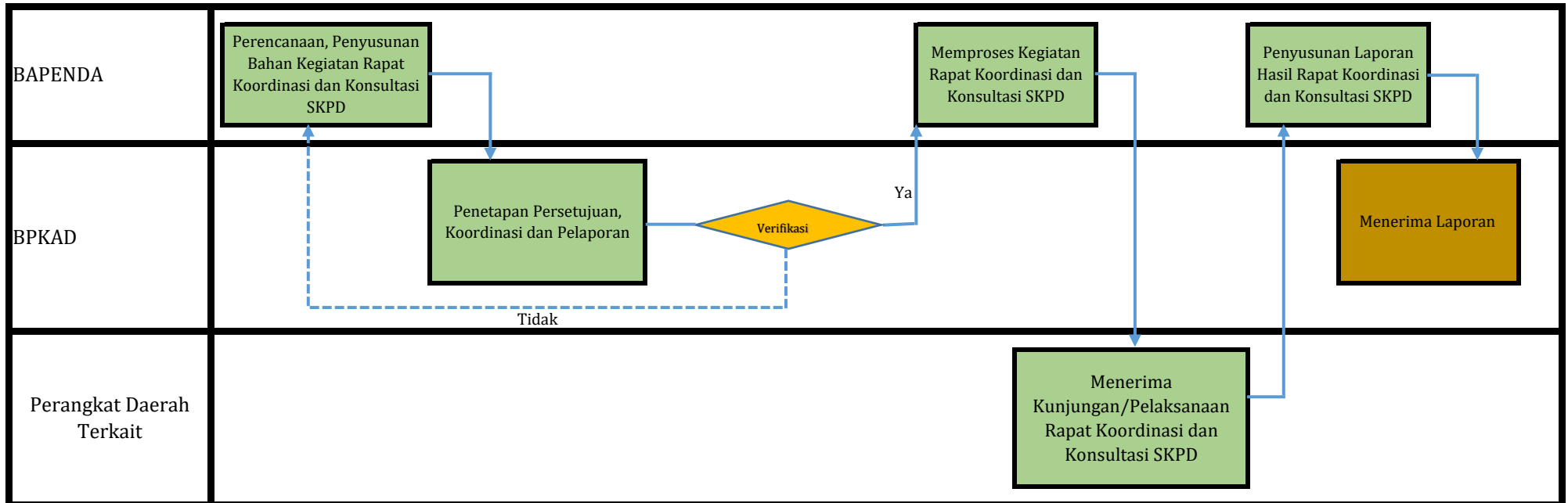
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
BAPENDA-01.14



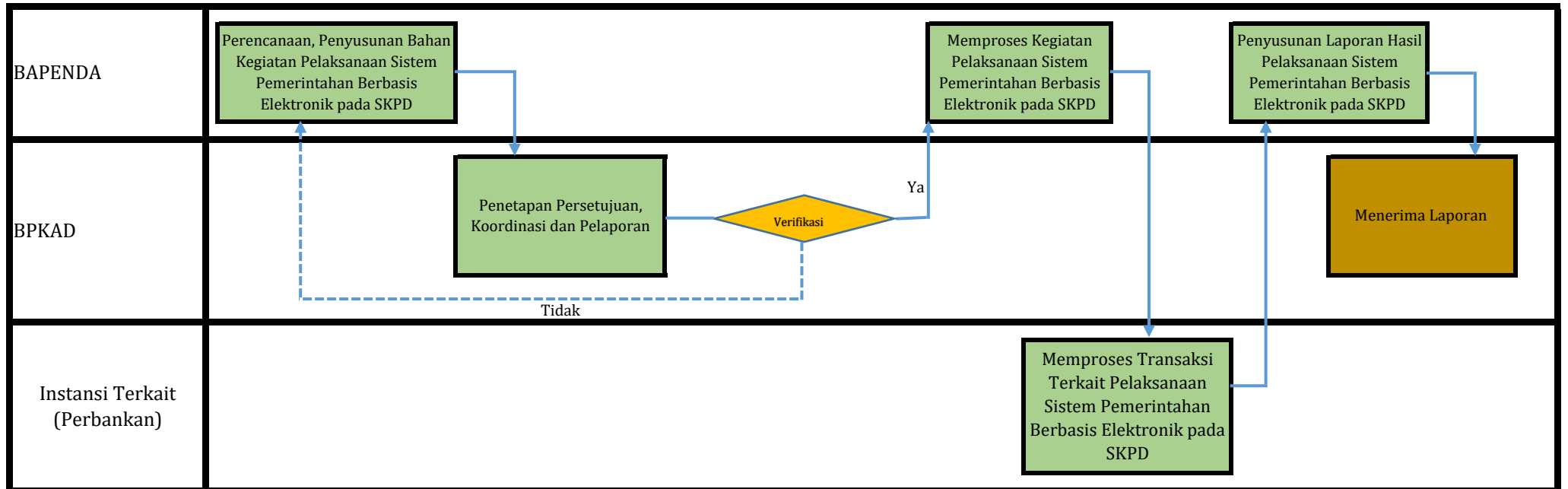
Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu  
BAPENDA-01.15



Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
 BAPENDA-01.16

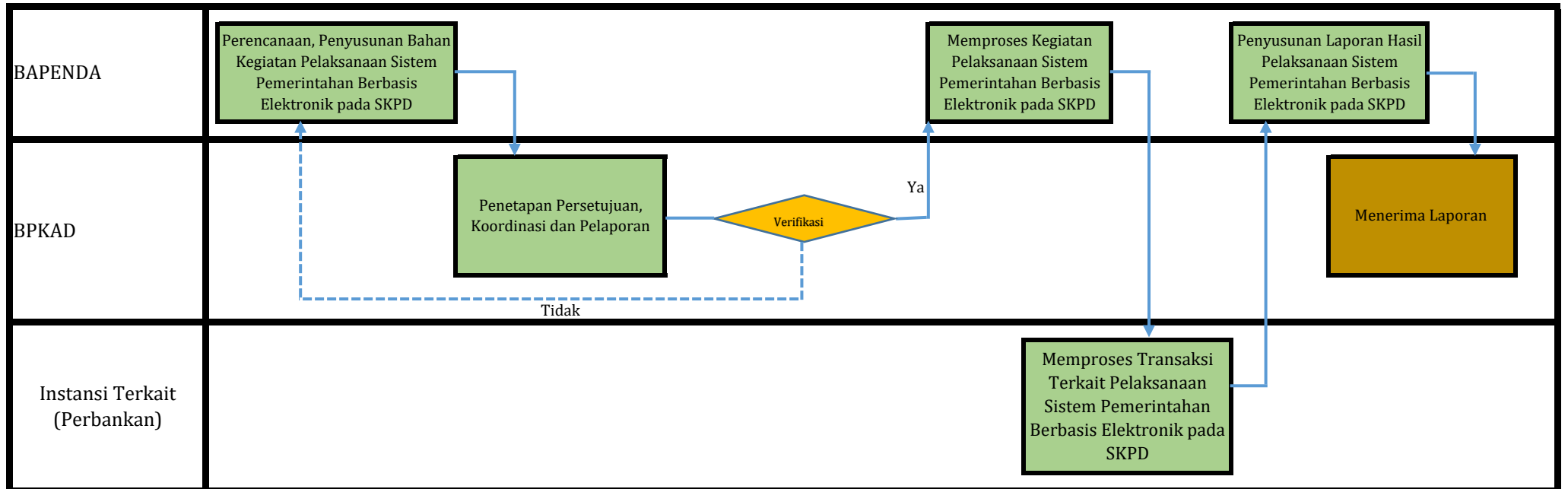


Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  
 BAPENDA-01.17

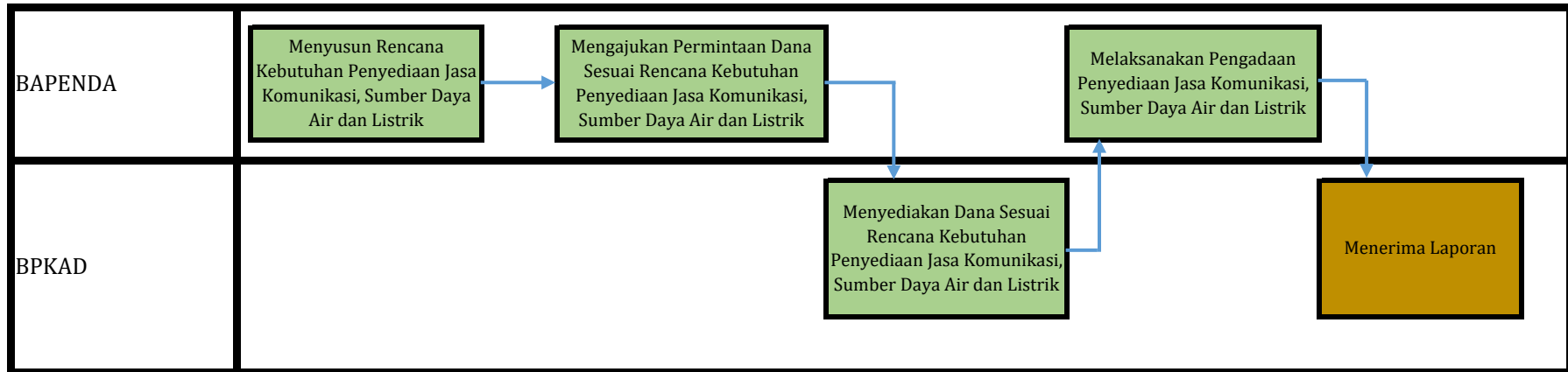




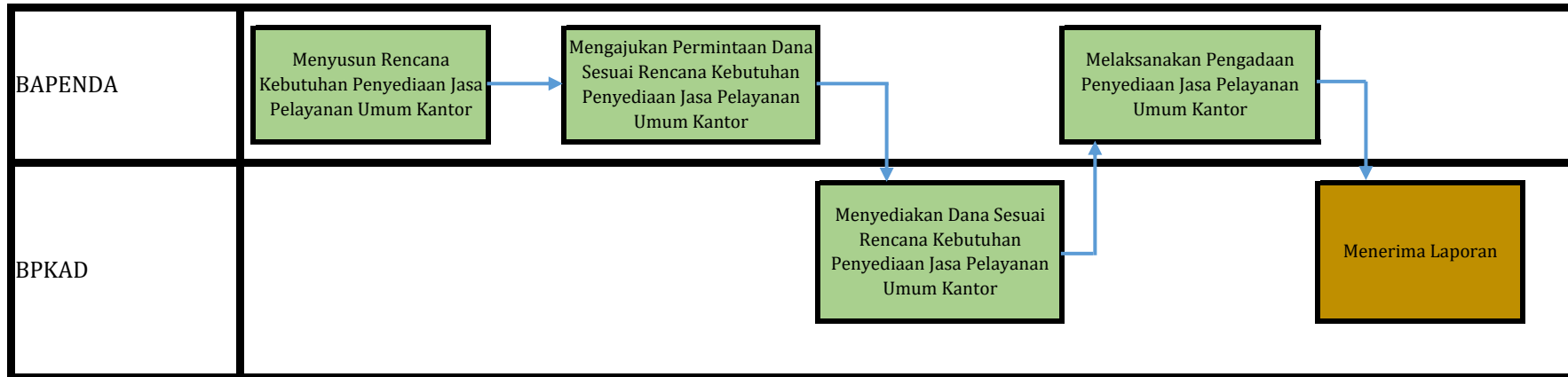
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  
 BAPENDA-01.17



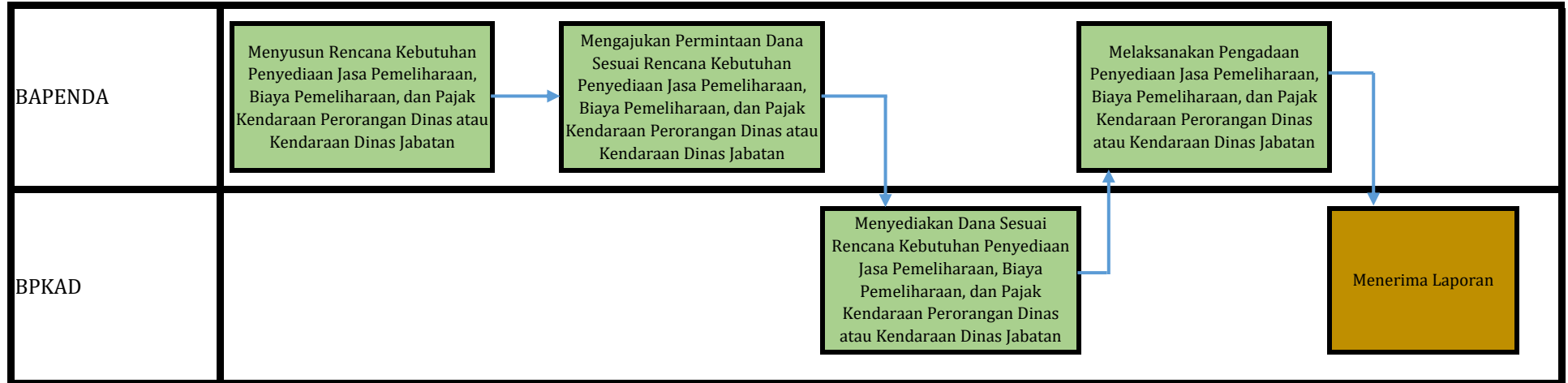
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
BAPENDA-01.18



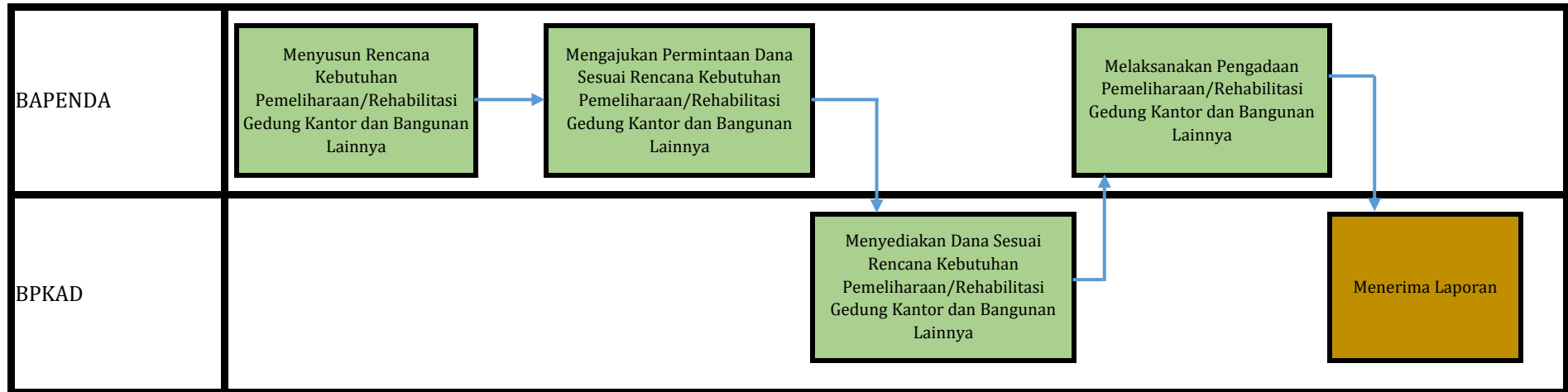
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
BAPENDA-01.19



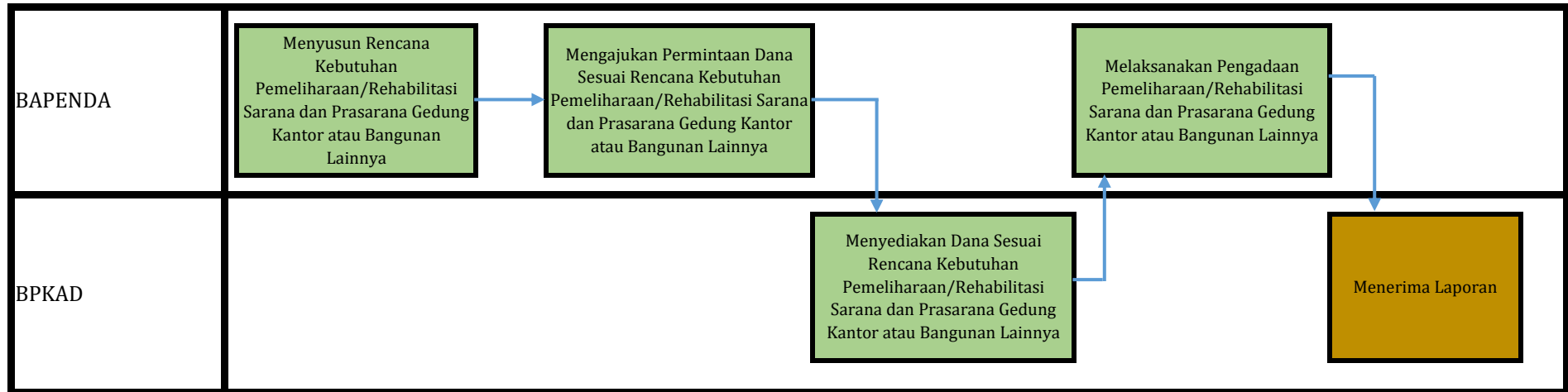
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
BAPENDA-01.20



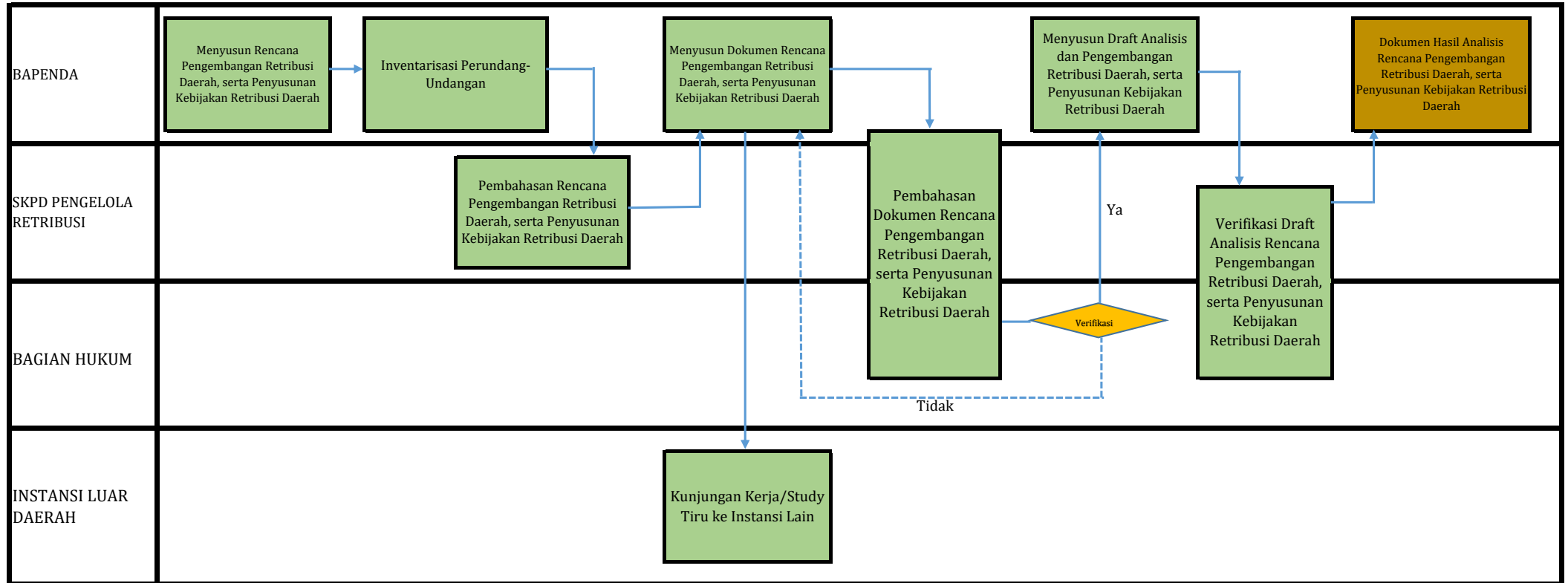
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  
BAPENDA-01.21



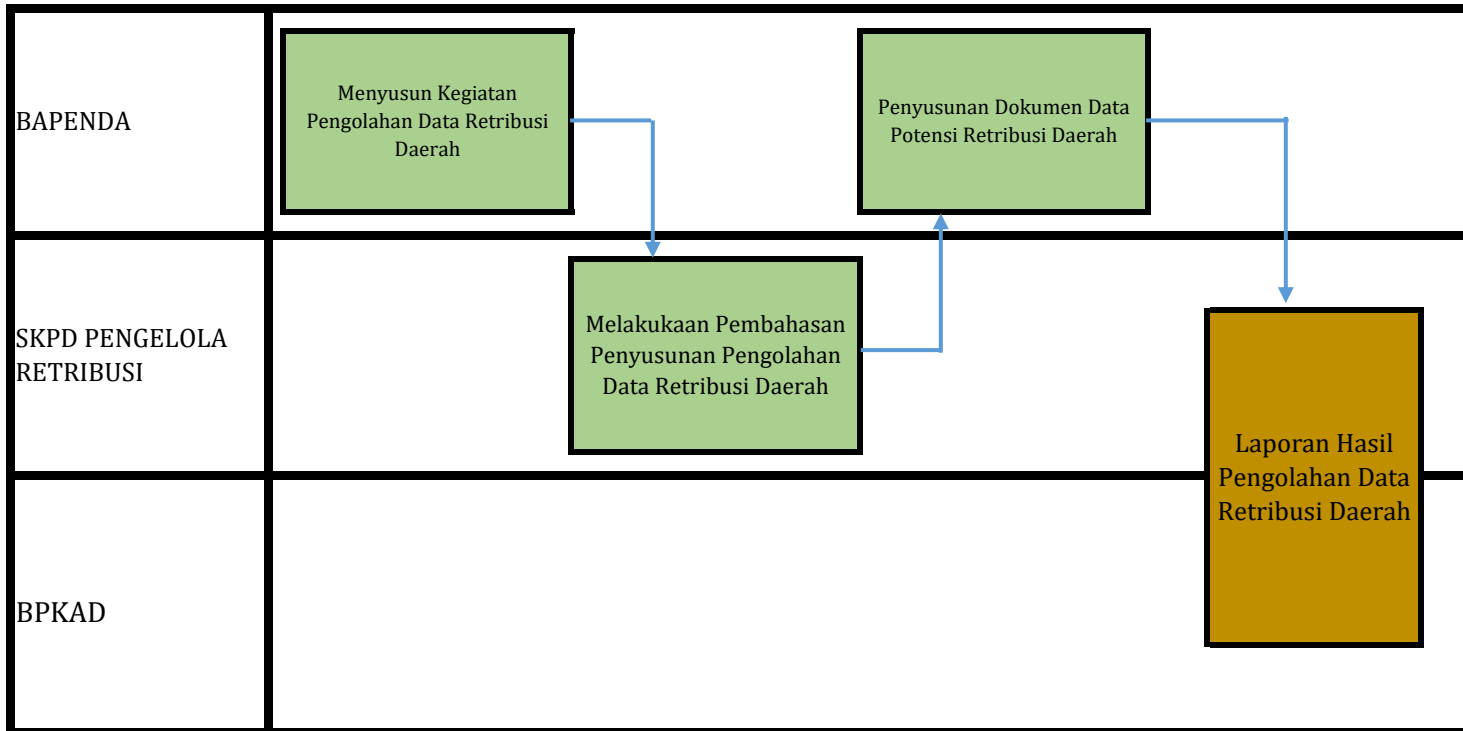
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
BAPENDA-01.22



Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah  
 BAPENDA-02.01

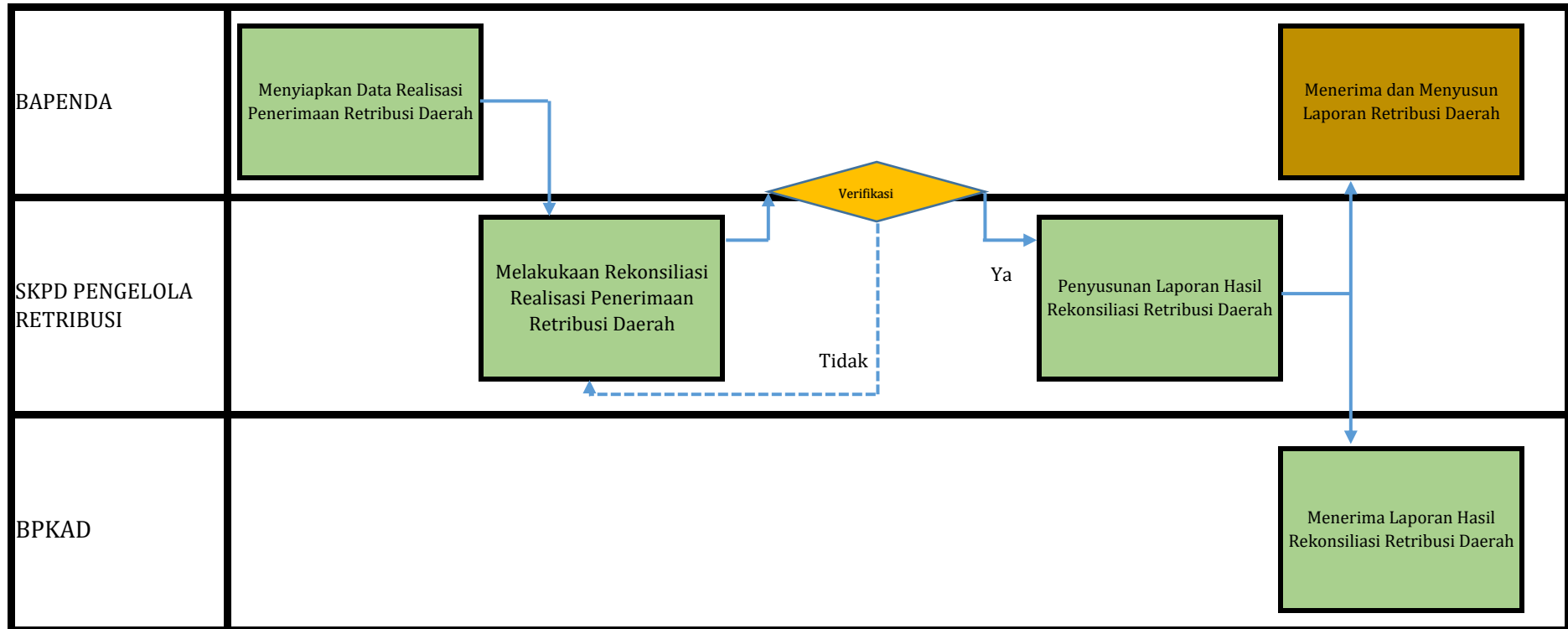


Pengolahan Data Retribusi Daerah  
BAPENDA-02.02

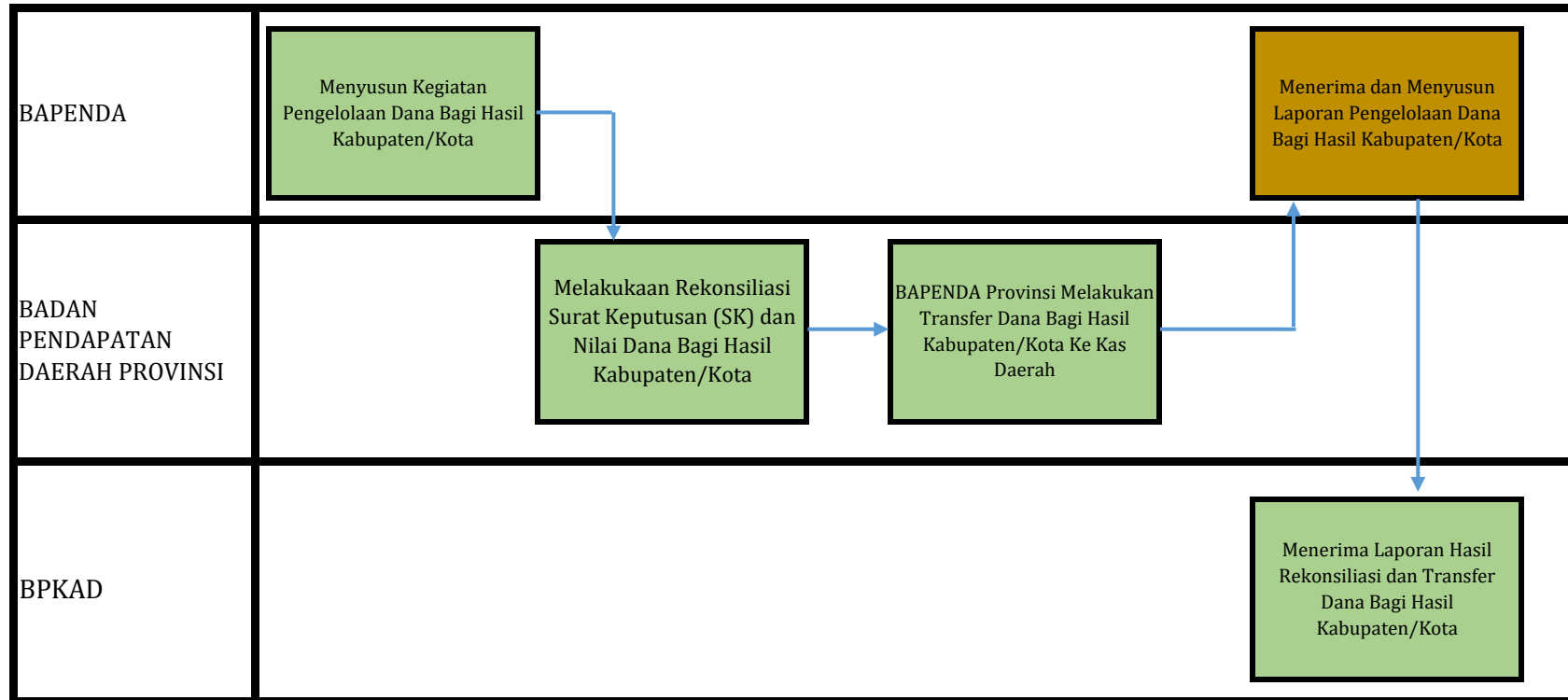




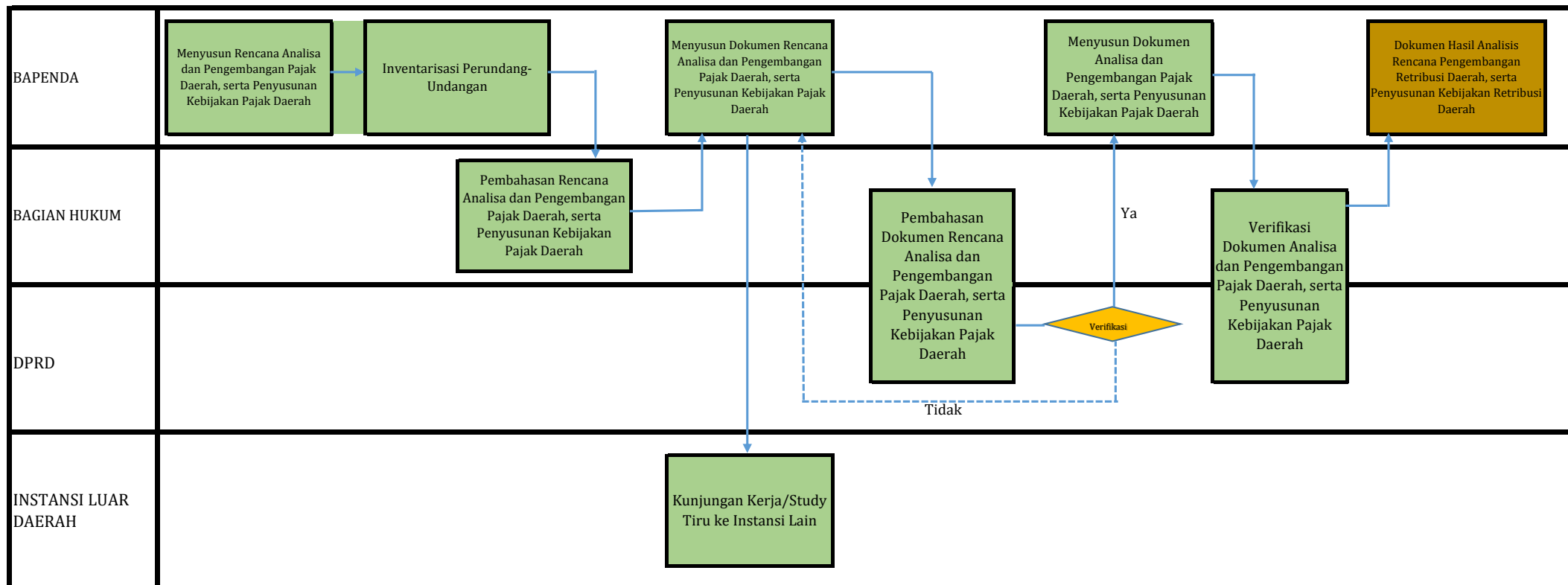
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah  
BAPENDA-02.03



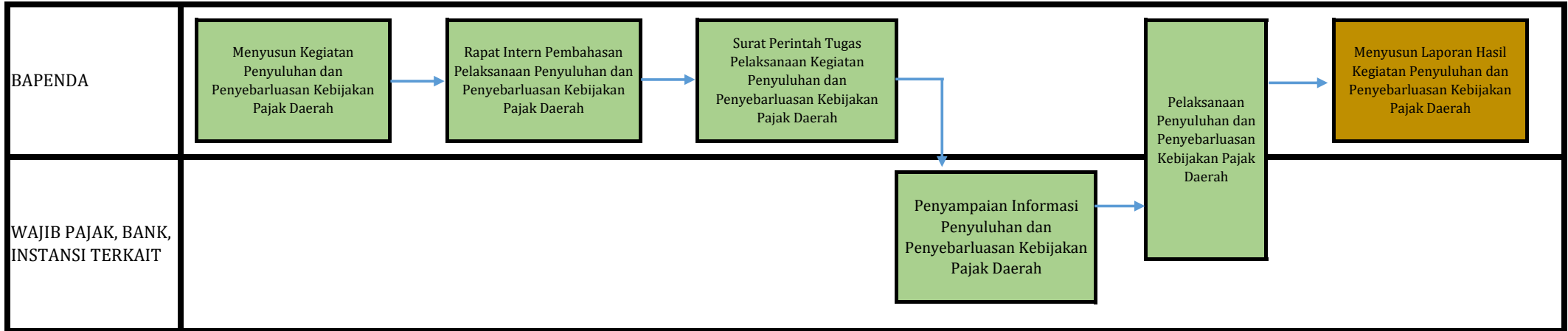
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota  
BAPENDA-02.04



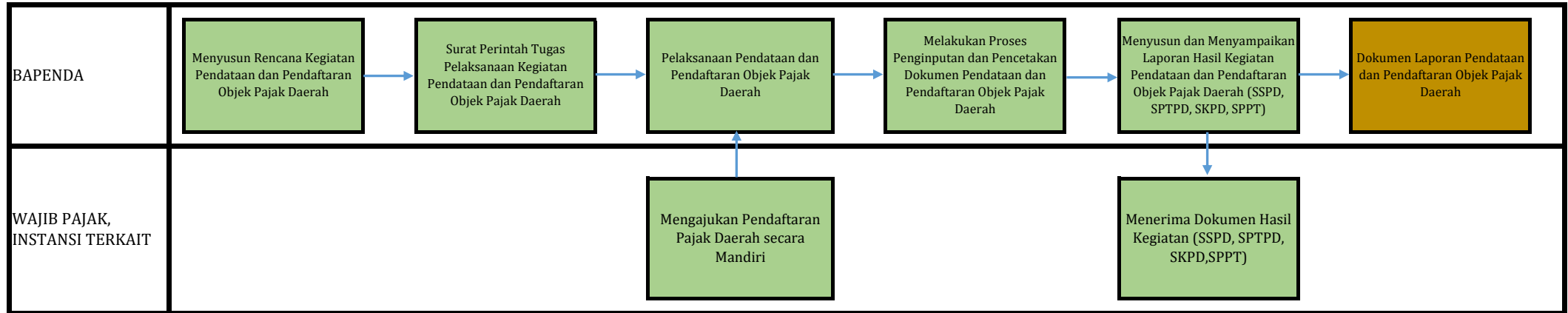
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah  
 BAPENDA-02.05



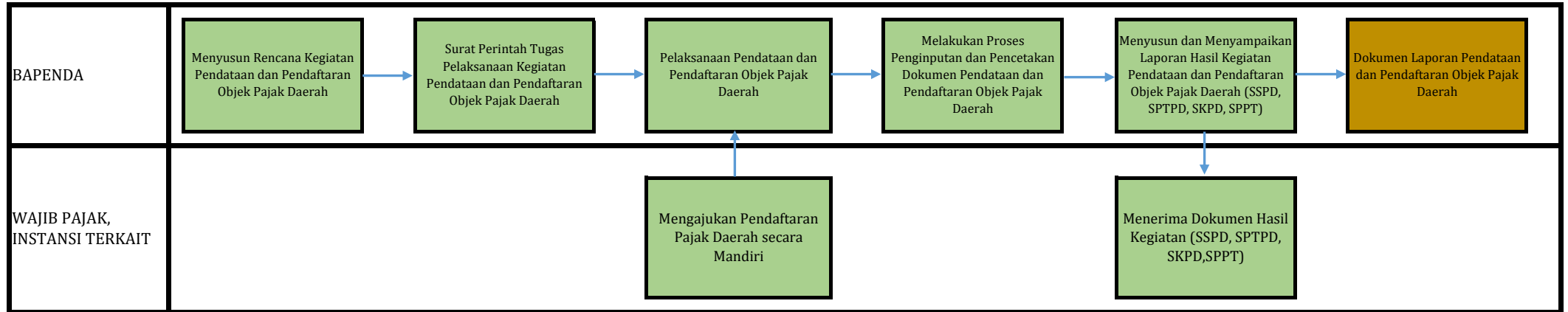
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  
BAPENDA-02.06



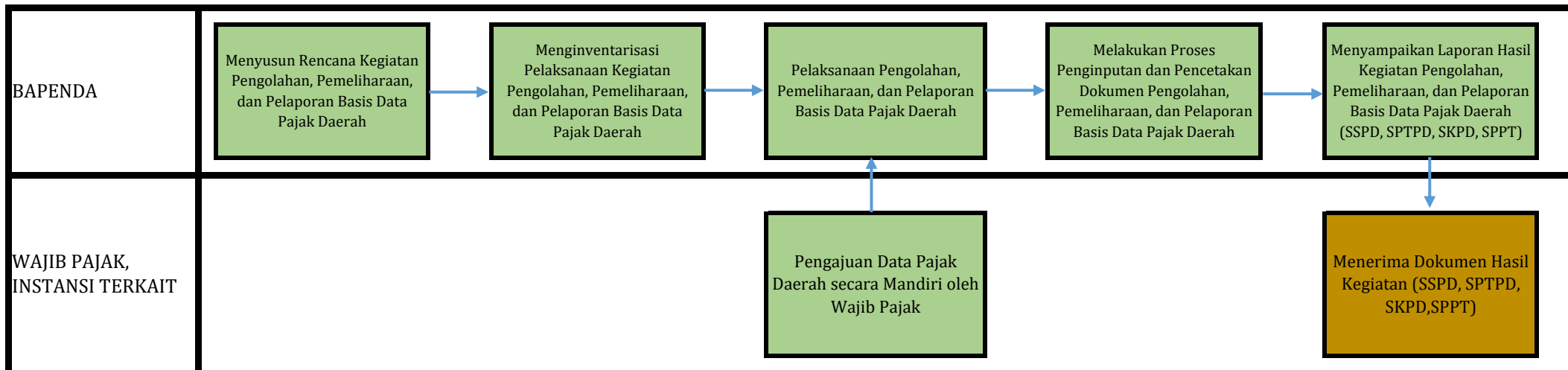
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  
 BAPENDA-02.07



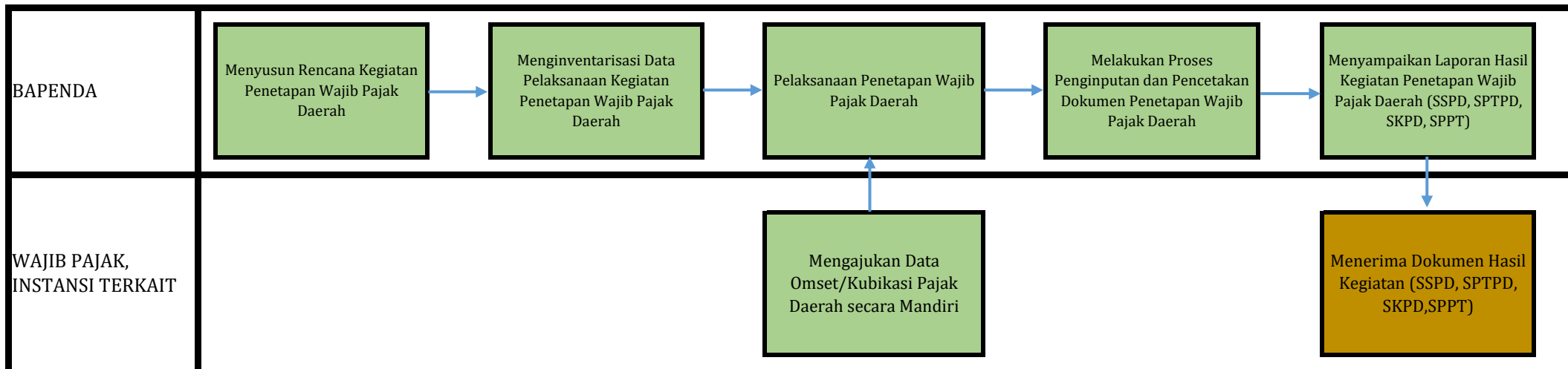
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  
 BAPENDA-02.07



Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah  
BAPENDA-02.08

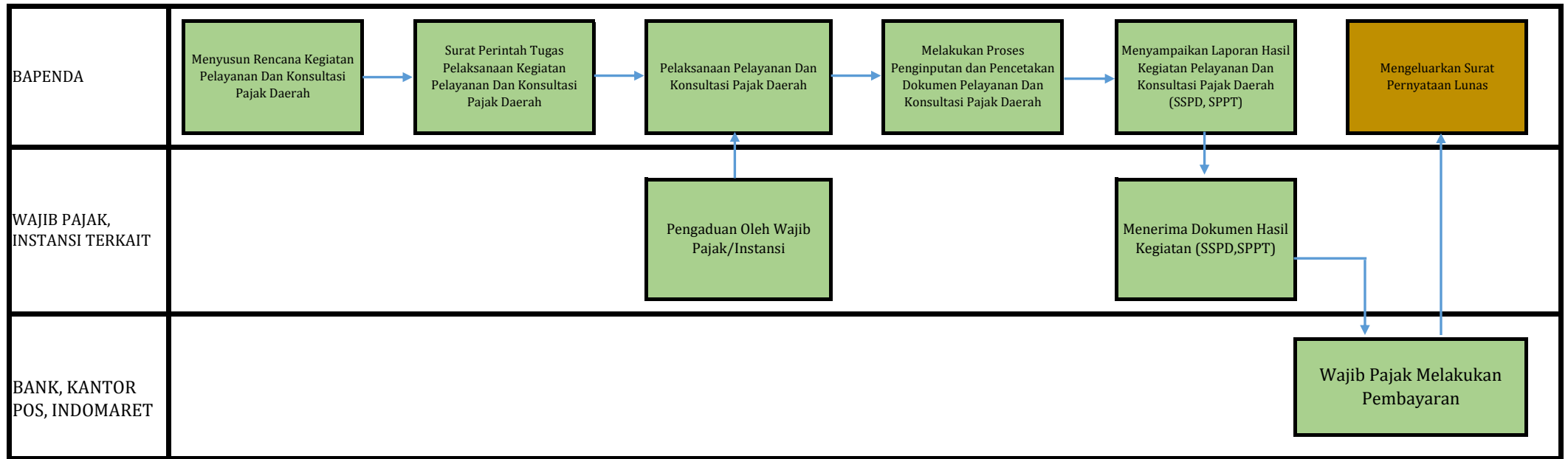


Penetapan Wajib Pajak Daerah  
BAPENDA-02.09

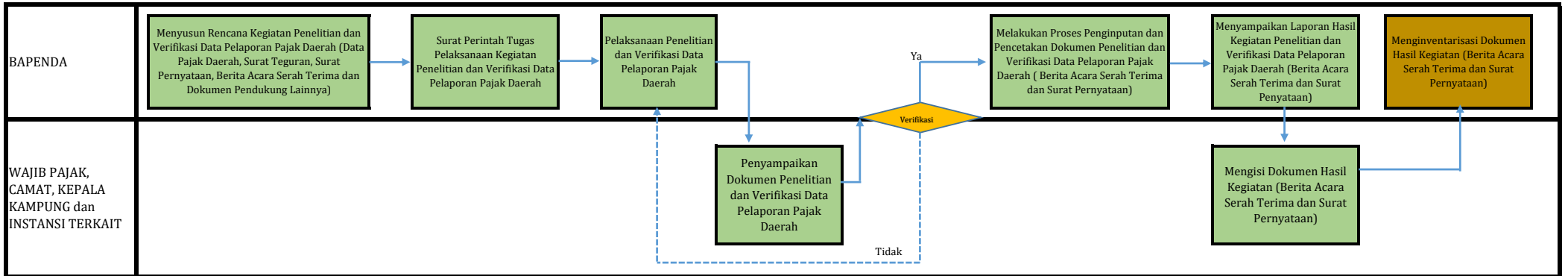




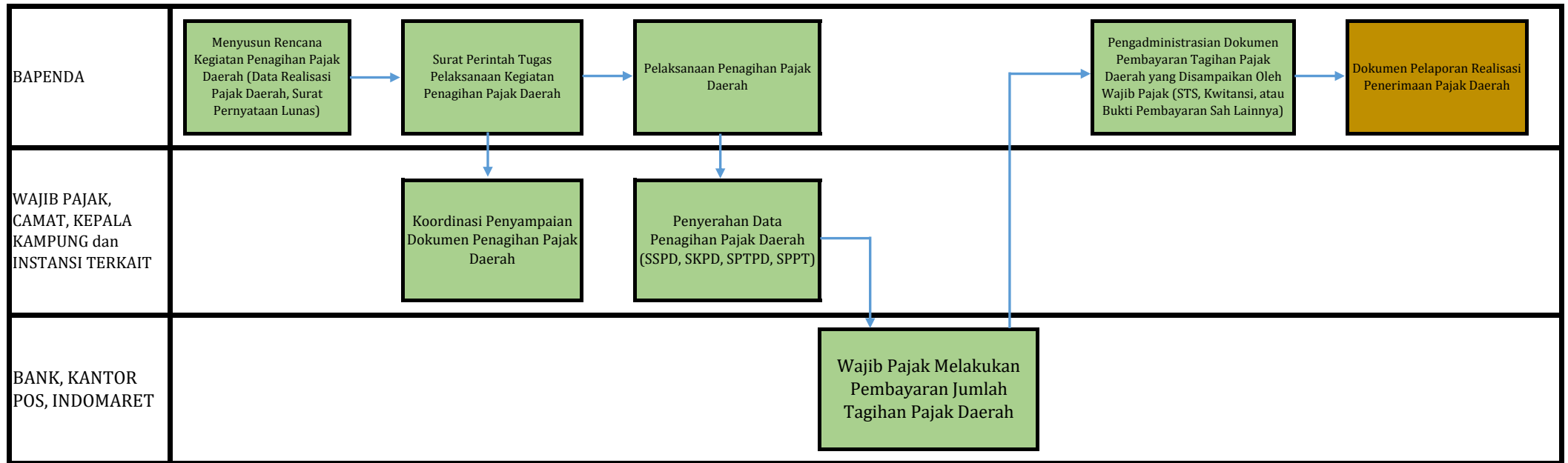
Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah  
BAPENDA-02.10



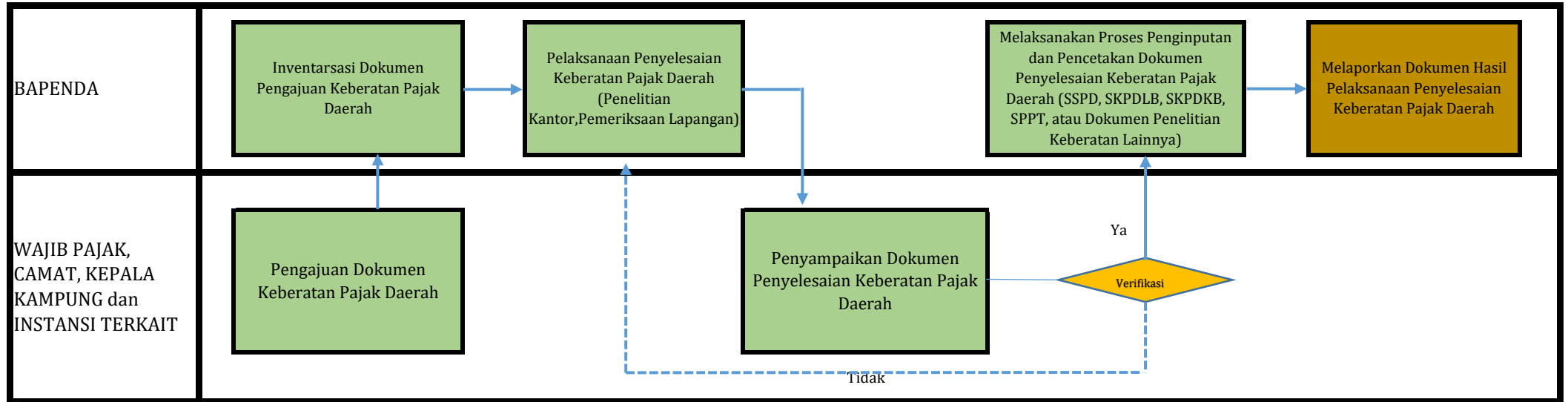
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah  
BAPENDA-02.11



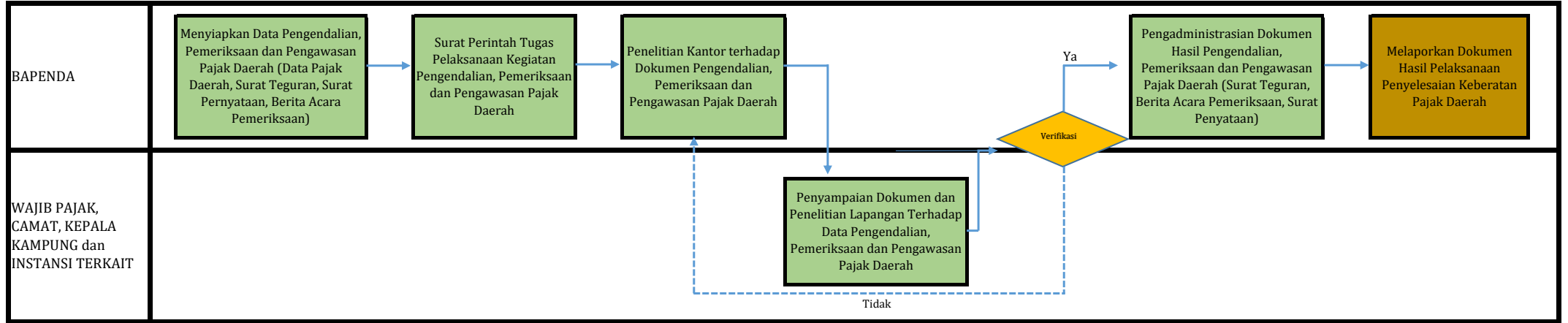
Penagihan Pajak Daerah  
BAPENDA-02.12



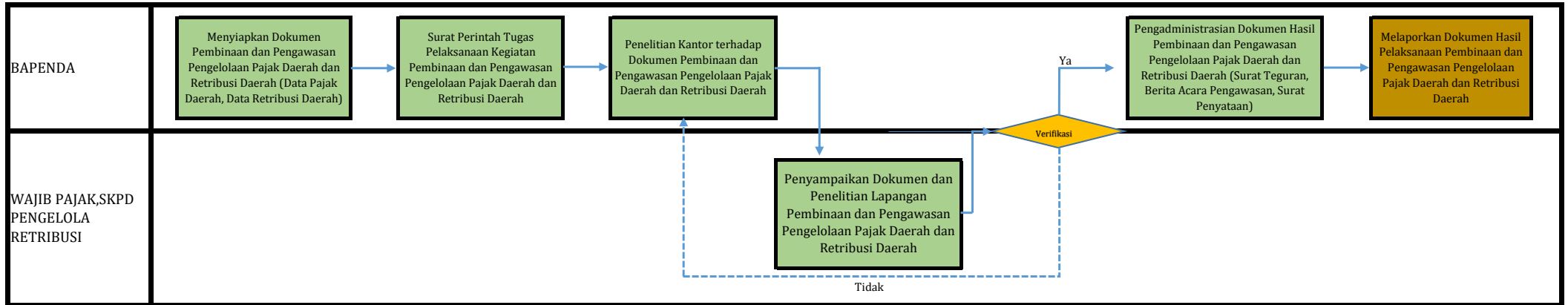
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah  
BAPENDA-02.13



Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah  
 BAPENDA-02.14



Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
 BAPENDA-02.15



**PETA RELASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN**

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

<b>BAPENDA-01</b>		
<p align="center"><b>BAPENDA-01.01</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset 3. BAPPEDA 4. Biro Administrasi Pembangunan 5. Sekretaris Daerah</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.02</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset 3. BAPPEDA 4. Biro Administrasi Pembangunan 5. Sekretaris Daerah</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.03</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset 3. Biro Organisasi 4. Inspektorat 5. Bagian Pemerintahan</p>
<p align="center"><b>BAPENDA-01.04</b> Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. BAPPEDA 3. Biro Organisasi 4. Inspektorat 5. Bagian Pemerintahan</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.05</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset 3. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.06</b> Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset 3. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>
<p align="center"><b>BAPENDA-01.07</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.08</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.09</b> Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>
<p align="center"><b>BAPENDA-01.10</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.11</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.12</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>
<p align="center"><b>BAPENDA-01.13</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.14</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.15</b> Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>
<p align="center"><b>BAPENDA-01.16</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.17</b> Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset 3. Instansi Terkait</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.18</b> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>
<p align="center"><b>BAPENDA-01.19</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.20</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	<p align="center"><b>BAPENDA-01.21</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>
	<p align="center"><b>BAPENDA-01.22</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>1. Badan Pendapatan Daerah 2. Badan Pengelola Keuangan &amp; Aset</p>	

## PETA RELASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

<b>BAPENDA-02</b>		
<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.01</b> Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Bagian Hukum 3. DPRD 4. Instansi Lain</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.02</b> Pengolahan Data Retribusi Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. SKPD Pemungut Retribusi 3. BPKAD</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.03</b> Pelaporan Pengolahan Retribusi Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. SKPD Pemungut Retribusi 3. BPKAD</p>
<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.04</b> Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. BAPENDA Provinsi 3. BPKAD</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.05</b> Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Bagian Hukum 3. DPRD 4. Instansi Lain</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.06</b> Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Wajib Pajak</p>
<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.07</b> Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Wajib Pajak</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.08</b> Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Wajib Pajak</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.09</b> Penetapan Wajib Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Wajib Pajak</p>
<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.10</b> Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Camat 3. Kepala Kampung 4. Wajib Pajak 5. Bank, Indomaret, Kantor Pos</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.11</b> Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Camat 3. Kepala Kampung 4. Wajib Pajak</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.12</b> Penagihan Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Camat 3. Kepala Kampung 4. Wajib Pajak 5. Bank, Indomaret, Kantor Pos</p>
<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.13</b> Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Camat 3. Kepala Kampung 4. Wajib Pajak</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.14</b> Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. Camat 3. Kepala Kampung 4. Wajib Pajak</p>	<p style="text-align: center; background-color: #f0e68c; margin: 0;"><b>BAPENDA-02.15</b> Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p style="margin: 0;">1. Badan Pendapatan Daerah 2. SKPD Pengelola Retribusi 3. Wajib Pajak</p>

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN WAY KANAN**



Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, MM  
NIP. 19706601 199702 1 005